

**ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN RUMAH KHUSUS DAN UMUM
DALAM SISTEM INFORMASI PENDATAAN DAN PEMANTAUAN (RUMAHKU SIP)
PADA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

Reni Agustin

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
reni.18012@mhs.unesa.ac.id

Meirinawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
meirinawati@unesa.ac.id

Abstrak

Minimnya data perumahan, kawasan pemukiman serta pengajuan IMB menyebabkan kurangnya data hunian dalam *database* pemerintah. Sedangkan, data tersebut sangat dibutuhkan pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai tata ruang. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam hal tersebut, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DCKPKP) Kabupaten Gresik berupaya memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengembangan Rumahku SIP yang dilaksanakan oleh DCKPKP Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan menggunakan strategi pengembangan *e-government* sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 antara lain yaitu: mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas, menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat, melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi pengembangan Rumahku SIP oleh DCKPKP Kabupaten Gresik dapat berjalan baik, seperti mengembangkan pelayanan yang prima, bekerjasama dengan beberapa organisasi perangkat daerah maupun pengembang perumahan, memanfaatkan perkembangan teknologi berbentuk *e-government*, melakukan pembinaan SDM, hingga pengembangan *e-government* secara sistematis. Namun, terdapat kendala yang terjadi. Kendala tersebut yaitu terdapat beberapa pengembang perumahan yang sulit diajak bekerjasama.

Kata Kunci: Strategi Manajemen, Strategi Pengembangan *Electronic Government*, Rumahku SIP

Abstract

The lack of housing data, residential areas and the application of IMB causes a lack of residential data in the government database. Meanwhile, this data is needed by the government in determining policies regarding spatial planning. As the agency responsible for this matter, the Office of Human Settlements, Housing and Settlement Areas (DCKPKP) of Gresik Regency seeks to provide solutions to overcome the problems that arise. The purpose of this study was to analyze the development strategy of Rumahku SIP implemented by DCKPKP Gresik Regency, East Java Province. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The data collection technique used is through interviews, observation, and literature study. The data analysis technique from this study uses the Miles and Huberman model by using an e-government development strategy in accordance with Presidential Instruction Number 3 of 2003, among others: developing a reliable and trusted service system that is affordable by the wider community, arranging management systems and government work processes and autonomous regional governments in a holistic manner, utilizing information technology optimally, increasing the participation of the business world and developing the telecommunications and information technology industry, developing human

resource capacity in both the government and the autonomous regional government, accompanied by increasing community e-literacy, carrying out development in a holistic manner. systematically through realistic and measurable stages. The results of this study indicate that the Rumahku SIP development strategy by DCKPKP Gresik Regency can work well, such as developing excellent service, collaborating with several regional apparatus organizations and housing developers, utilizing technological developments in the form of e-government, conducting human resource development, to e-government development. systematically. However, there are obstacles that occur. The obstacle is that there are several housing developers who are difficult to work with.

Keywords: *Management Strategy, Electronic Government Development Strategy, Rumahku SIP*

PENDAHULUAN

Manusia sama sekali tidak lepas dari segala hal yang berkaitan dengan tempat dimana manusia tersebut bernaung dan menjalani kehidupan sehari-hari. Perumahan merupakan kebutuhan pokok (*basic needs*) disamping kebutuhan sandang dan pangan bagi seseorang. Di Indonesia, setiap orang yang ingin membangun rumah atau bangunan lain memerlukan izin yang dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tempat tinggal atau biasa disebut juga dengan rumah adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap manusia, rumah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk ciri dan juga kepribadian bangsa. Dalam hal memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat, pemerintah melakukan berbagai hal yang digunakan untuk pembangunan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mengenai upaya pemerintah yang juga merupakan tujuan Negara yaitu terciptanya kemakmuran bagi rakyat.

Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik sendiri yang tidak atau kurang menyadari pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait. Terkadang beberapa orang membangun, mengubah atau menghancurkan suatu bangunan tanpa mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut Ramadhani (2018) masyarakat berfikir bahwa pelayanan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkesan rumit, tidak transparan, dan mahal. Hal tersebut mungkin saja menjadi alasan mengapa masyarakat kurang menyadari pentingnya Izin Mendirikan Bangunan.

Inisiatif *e-government* yang populer di Negara maju dan berkembang saat ini, menjadi metode yang efektif dan menjadi prioritas bagi pengambil keputusan pemerintah. Sementara itu, dari perspektif warga, *e-government* dapat dengan mudah diakses oleh warga untuk mengakses layanan publik kapan saja, dimana saja, dengan biaya yang lebih rendah, sederhana serta cepat (Yustiari, 2019).

E-government telah menjadi cara yang efektif dalam mengembangkan kinerja instansi pemerintah atau sektor publik. *E-government* sebenarnya bukan tujuan utama dalam suatu organisasi, namun dengan adanya *e-government* beberapa masalah seperti kebijakan dan program pemerintah dapat diselesaikan dengan cara lebih sederhana, lebih cepat, lebih transparan serta lebih praktis (Wanto, 2019).

E-Government dalam proses pengembangan strateginya memilih rencana dengan mengembangkan sistem layanan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh masyarakat luas. Masyarakat berharap batas-batas organisasi dan kewenangan struktur birokrasi tidak menjadi faktor pembatas bagi pelayanan publik yang baik. Salah satu aspek terpenting dalam merumuskan kebijakan publik yang baik adalah dengan memastikan arus informasi yang bebas untuk menjaga hubungan positif antara pemerintah dan untuk mendorong keterlibatan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam rangka proses implementasi untuk mencapai tujuan penggunaan teknologi informasi tersebut, pada tanggal 9 Juni 2003, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan *e-government*. Menurut Silva, et al (2018) mendefinisikan bahwa *e-Government* sebagai penggunaan data dan komunikasi teknologi untuk meningkatkan penyampaian layanan, produktivitas, serta tanggung jawab yang terjadi antara pemerintah dan juga warga negara. Menurut Arief, et al, (2020) tujuan dari *e-government* yaitu untuk menghemat sumber daya yang ada termasuk uang, waktu serta sumber daya manusia.

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai *e-government* merupakan sebuah inovasi dalam reformasi birokrasi di Indonesia yang mengharuskan adanya suatu perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel yang berbasis elektronik. Perubahan dan perkembangan tersebut memang merupakan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan memberikan

aspirasinya mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang akses, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi berkapasitas besar secara cepat dan akurat (Widodo, 2019).

Sehubungan dengan masalah dan pemaparan tersebut, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik membuat suatu inovasi *electronic government*, yakni Rumahku SIP (Rumah Khusus & Umum dalam Sistem Informasi Pendataan dan pemantauan) yang digunakan untuk pendataan wilayah perumahan dan juga pemukiman di Kabupaten Gresik. Program ini menggunakan pendataan yang telah terintegrasi dengan sistem pajak daerah. Rumahku SIP ini telah digunakan oleh 263 pengembangan perumahan di daerah Kabupaten Gresik.

Dalam hal ini, Rumahku SIP sebagai salah satu inovasi *E-Government* perlu dilakukan pengembangan dengan tujuan dapat membantu pemerintah untuk mencapai program dengan lebih baik lagi dalam hal pendataan tersebut. Pengembangan *e-government* juga merupakan sarana untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintah. Pengembangan *e-government* melibatkan pemeliharaan sistem administrasi serta proses kerja di kantor-kantor pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. (Widiyaningrum, 2020).

Inovasi Rumahku SIP ini murni lahir Berdasarkan permasalahan yang berkembang dan minimnya data perumahan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Gresik. Pemerintah membutuhkan data berupa rumah umum, rumah komersial, rumah swadaya, rumah khusus, dan rumah Negara yang termasuk di dalamnya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kawasan kumuh, dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sedangkan data tersebut sangat dibutuhkan bagi Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik dalam menentukan kebijakan mengenai tata ruang.

(sumber: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pendataan-perumahan-akurat-dan-mutakhir-dengan-rumahku-sip>).

Inovasi Rumahku SIP ini sudah ada sejak tahun 2018 dan telah meraih penghargaan Top 45 inovasi pelayanan publik di Tahun 2020. Inovasi disini dimaksudkan untuk membantu manajemen dalam mencapai proses kerja yang lebih baik sehingga kelangsungan dan ketahanan bisnis tetap berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Karena dukungan

kemampuan inovasi seperti produk baru, ide baru dan lainnya (Wahyud, 2019).

Salah satu bentuk dari suatu inovasi adalah strategi. Strategi merupakan salah satu cara yang dilakukan sebagai penentu dalam mencapai suatu keberhasilan dalam suatu kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Rivai dan Darsono (2015) strategi adalah alat serta cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Mulyadi (2014) strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi dari perusahaan, melalui misi perusahaan.

Menurut David (2011) mengatakan bahwa strategi adalah tindakan potensial yang memerlukan pengambilan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, strategi dapat berdampak pada pertumbuhan *bottom line* perusahaan. Hal ini kemungkinan akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan sebagai hasil dari persiapan untuk masa depan

Sedangkan menurut Niswah & Meirinawati (2015) menyatakan bahwa ada dua hal penting yang terkait manajemen strategi antara lain yaitu:

- a) Manajemen strategis terdiri dari tiga proses yaitu:
 1. Pembuatan strategi, yang mencakup pengembangan misi serta tujuan dalam jangka panjang, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan organisasi, meningkatkan alternatif serta menetapkan strategi yang tepat untuk diadopsi.
 2. Implementasi strategi, termasuk tujuan operasional tahunan, kebijakan organisasi, memotivasi anggota, serta melakukan alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan dapat diimplementasikan.
 3. Evaluasi/pemantauan strategi, mencakup upaya untuk memantau semua hasil dari pembuatan dan pelaksanaan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan juga perusahaan serta mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.
- b) Manajemen strategis, berfokus pada penyatuan atau penggabungan aspek-aspek pemasaran, penelitian dan pengembangan keuangan/akuntansi serta produksi operasional dari sebuah bisnis atau bidang.

Pada dasarnya, strategi menunjukkan sebuah alat yang digunakan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi juga dapat menjadi sebuah rencana besar sekaligus penting yang wajib untuk dilakukan.

Setiap organisasi yang dijalankan dengan baik pasti mempunyai strategi, meskipun tidak dinyatakan secara terang-terangan. Strategi menempatkan parameter sebuah program atau proses, dalam artian memastikan tempat bisnis dan cara bisnis untuk dapat bersaing agar lebih maju dalam pengembangannya.

Strategi pembangunan itu sendiri adalah suatu kegiatan yang selalu berkembang atau mengalami kemajuan yang berkesinambungan, dan dilakukan dari perspektif apa yang diharapkan di masa yang akan datang atau masa depan itu sendiri (Umar, 2011).

Akan tetapi, dalam strategi pengembangan Program Rumahku SIP ini masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi berupa kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan literasi masyarakat. Hal tersebut membutuhkan upaya yang maksimal untuk dilakukan agar mendukung kemajuan Program Rumahku SIP dalam lingkup *e-government*.

Untuk itu, pemerintah dapat melakukan upaya atau rencana dalam strategi pengembangan Rumahku SIP sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 yaitu meningkatkan kesadaran sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya sebuah informasi serta penggunaan TIK (*e-literacy*) yang berada dalam lingkup pemerintah pusat, daerah otonom, maupun masyarakat, demi mewujudkan budaya informasi menuju masyarakat informasi (*information society*).

Sedangkan mengenai inovasi yang diselenggarakan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik ini, maka jelas sudah diperlukan adanya strategi pengembangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan dalam mengembangkan Rumahku SIP yang diselenggarakan oleh kelembagaan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik. Sehingga dapat mengetahui bagaimana dan apa saja strategi pengembangan dalam mengembangkan aplikasi Rumahku SIP tersebut. Dalam penyelenggaraan dan pengembangannya dengan melakukan berbagai strategi maka diharapkan pemerintah dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dalam pembuatan Rumahku SIP. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengembangan Rumahku SIP yang dilaksanakan oleh DCKPKP Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif yang dipadukan dengan metodologi kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi dan juga menguraikan mengapa hal tersebut dapat terjadi (Sugiyono, 2009). Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dalam pengertinnya, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik wawancara. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh pendapat atau ide-ide dari narasumber atau pihak yang diajak untuk wawancara. Dalam penelitian ini, saya melakukan wawancara pada kepala bidang rumah umum. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gresik Program dalam strategi pengembangan inovasi Rumahku SIP tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data sumber data tambahan yang dikumpulkan bukan melalui sumber utama, akan tetapi melalui sumber kedua, atau sumber ketiga dan seterusnya. Beberapa peneliti selalu mengutip contoh dokumen misalnya literatur atau naskah akademik sebagai data sekunder.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari empat tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, serta verifikasi data yang nantinya akan dikembangkan dan dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan data tersebut.

Pengambilan fokus pada penelitian ini berasal dari Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang terdiri dari:

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.

Harapan yang dimiliki masyarakat dalam hal layanan publik yang diberikan tanpa terhambat oleh wewenang birokrasi dan batasan organisasi. Arus informasi yang berjalan dengan lancar untuk menunjang hubungan baik dengan lembaga Negara, juga mendorong masyarakat dalam partisipasinya merupakan hal penting yang akan berpengaruh untuk penyusunan kebijakan Negara. Oleh sebab itu, pelayanan

- publik harus transparan, dapat dipercaya dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
Keberhasilan strategi satu (1) tersebut perlu ditunjang dengan penyusunan sistem manajemen serta proses kerja disemua instansi, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dalam hal ini pembenahan sistem manajemen dan tata cara kerja pemerintah harus dirancang agar dapat dengan cepat memahami dan juga menerapkan kemajuan teknologi informasi.
 3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
Perluasan jaringan komunikasi serta kemajuan informasi yang telah dicapai dalam teknologi informasi dapat memberikan berbagai peluang serta keperluan bagi instansi pemerintah. Meningkatkan partisipasi maupun pengembangan industri komunikasi dan TIK. Dalam hal ini tidak ada keharusan bahwa pemerintah yang bertanggungjawab penuh atas pembangan dari pelayanan publik. Keterlibatan dunia usaha juga memiliki potensi untuk mempercepat pencapaian tujuan strategis dari *e-government*.
 4. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang menentukan dan merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan serta pengembangan *e-government*. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia memiliki peran sebagai pengembang, pengelola dan pengguna dari *e-government* tersebut.
 5. Melaksanakan pengembangan sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.
Setiap perubahan yang dilakukan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh karenanya untuk melakukan pengembangan *e-government* ini harus direncanakan dan dilaksanakan secara teratur menggunakan rangkaian tahapan yang realistis dan tujuan yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari tahapan

persiapan, tahap pematangan, tahap pemantapan, serta tahap pemanfaatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil data yang telah disajikan serta dipaparkan dalam hasil penelitian terkait Analisis Strategi Pengembangan Rumah Khusus dan Umum dalam Sistem Informasi Pendataan (RUMAHKU SIP) Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi pengembangan *electronic government* sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang mempunyai 6 strategi pengembangan yang berkaitan dengan sistem pelayanan yang dapat dijangkau masyarakat, sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat maupun daerah otonom, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan peran dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi, dan pengembangan SDM yang disertai dengan peningkatan *e-literacy* masyarakat, serta pelaksanaan pengembangan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik, khususnya pada inovasi Rumahku SIP, analisis strategi pengembangan Rumahku SIP antara lain meliputi:

1. Mengembangkan Sistem Pelayanan yang Andal dan Terpercaya, serta Terjangkau oleh Masyarakat Luas.

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan berupa layanan kepada masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Prasetya & Niswah, 2020). Menurut Artitania, dkk (2022) dalam implementasi pelayanan publik masyarakat mengharapkan adanya layanan yang baik dari pemerintah, sehingga membuat masyarakat yang mendapatkan pelayanan dapat merasa puas. Hal ini dikarenakan masyarakat akan menilai baik dan buruknya layanan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Penilaian yang diberikan oleh masyarakat tersebut nantinya akan menjadi tolak ukur tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik.

Tujuan dari suatu pelayanan yang andal dan terpercaya, dan terjangkau oleh masyarakat luas merupakan pengembangan kualitas informasi dan jaringan komunikasi yang terjadi ke segala penjuru Negeri dengan tarif yang cukup murah, pembentukan sebuah portal informasi pelayanan masyarakat yang terintergrasi dengan sistem manajemen maupun proses kerja pemerintah,

pembentukan jaringan organisasi pendukung yang menjadi penghubung antara portal pelayanan dan pengamanan informasi dalam menjamin keandalan dan kelancaran sebuah proses informasi yang tersedia.

Adanya permasalahan yang berkembang mengenai minimnya data perumahan dan kawasan pemukiman, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pengajuan izin mendirikan bangunan yang dapat menyebabkan kurangnya data hunian yang terdapat dalam *database* pemerintah, menyebabkan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik membuat suatu inovasi *electronic government* yaitu Rumahku SIP. Rumahku SIP merupakan sebuah aplikasi yang didalamnya tersedia berbagai informasi data lengkap mengenai masing-masing rumah. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Rizal Sulistyio Nugroho, ST, MT selaku Kepala Bidang Rumah Umum yang mengatakan bahwa:

“Data masing-masing rumah yang terdapat dalam aplikasi Rumahku SIP meliputi: nama blok, nomor unit, las lahan, luas bangunan, jumlah lantai, fungsi, NIK, NOP, dan foto”.

Dengan adanya inovasi tersebut, membuat masalah-masalah yang ada di atas dapat terselesaikan. Masalah-masalah yang telah diatasi setelah berjalannya inovasi Rumahku SIP ini antara lain yaitu adanya Rumahku SIP dapat mengakomodasi informasi dan pendataan mengenai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, adanya Rumahku SIP juga dapat memudahkan pemantauan terhadap komposisi perumahan yang dibangun agar sesuai dengan aturan hunian berimbang, dimana wajib terdapat penyediaan rumah sederhana sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan rumah hunian. Masalah utama yang dapat diatasi dengan adanya Rumahku SIP ini adalah permasalahan mengenai kurangnya data hunian yang terdapat dalam *database* pemerintah. Setelah adanya inovasi tersebut, terdapat kenaikan yang cukup signifikan mengenai data hunian tersebut.

Adanya hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan organisasi perangkat daerah dapat mengawal tertib administrasi masyarakat dan perusahaan pengembang perumahan dalam mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

perubahan melalui Dinas Perijinan. Berdasarkan informasi yang bersumber melalui Dinas Perijinan Kabupaten Gresik diketahui bahwa data pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal yang diterbitkan izinnnya pada tahun 2018 sebanyak 758 IMB sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 3399 IMB. Hal ini membuktikan bahwa adanya pengembangan Rumahku SIP ini memperlihatkan hasil yang cukup baik.

Oleh karena itu, data tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya inovasi ini dapat mengatasi permasalahan utama mengenai minimnya data yang ada dalam *database* pemerintah Kabupaten Gresik. Dalam hal ini dapat dilihat dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan tersebut.

2. Menata Sistem Manajemen dan Proses Kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah Otonom secara Holistik.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang pesat dapat menjadikan peluang bagi pemerintah dalam hal peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi pada lembaga pemerintah. Perkembangan teknologi yang ada juga harus dibarengi dengan sistem atau proses kerja pemerintah yang lebih baik lagi. Dalam hal ini, adanya perbaikan proses kerja yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik yaitu Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik bekerja sama dengan beberapa organisasi perangkat daerah lain yang terkait mengenai implemmentasi inovasi Rumahku SIP tersebut. Beberapa organisasi perangkat daerah yang bekerja sama dalam hal ini diberi nama Satuan Kerja Pelaksana Pengawasan Pengendalian Perumahan Dan Kawasan Pemukiman. organisasi perangkat daerah yang tergabung didalamnya antara lain yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Adanya inovasi Rumahku SIP ini menyebabkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik pada unit rumah maupun prasaranan dan sarana utilitas umum yang dapat digunakan oleh beberapa organisasi perangkat daerah tersebut yang

kemudian akan menjadi basis data yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Pelaksana Pengawasan Pengendalian Perumahan Dan Kawasan Pemukiman tersebut. Perubahan yang terjadi juga dapat dimanfaatkan oleh organisasi perangkat daerah lain seperti Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebagai rujukan awal dalam pembaruan data objek pajak bagi yang mengalami peningkatan luas tanah dan juga bangunan.



Gambar 1. Proses Kerja Sama dengan Beberapa Organisasi Perangkat Daerah

(Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik)

Bagi pemerintah, dalam hal koordinasi dengan instansi yang lain seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk mengelola kawasan perumahan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Hal tersebut berujuan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi seperti pernyataan Bapak Rizal Sulisty Nugroho, ST, MT selaku Kepala Bidang Rumah Umum yang mengatakan bahwa:

“Tujuan adanya kerjasama dengan instansi lain adalah untuk mengelola kawasan perumahan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perumahan dapat mengalami penurunan”.

Dalam hal ini, peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemadam kebakaran, kecamatan, serta desa berperan dalam menjaga keselarasan lingkungan serta penegakan aturan. Selain itu, data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada dalam aplikasi juga merupakan data terintegrasi yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh organisasi perangkat daerah lain dalam melaksanakan pelayanan publik.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: otonomi daerah merupakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gresik melakukan kerjasama bersama beberapa organisasi perangkat daerah lain yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan yang dan juga untuk pencapaian tujuan yang lebih maksimal, serta memberikan keuntungan pada masing-masing organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

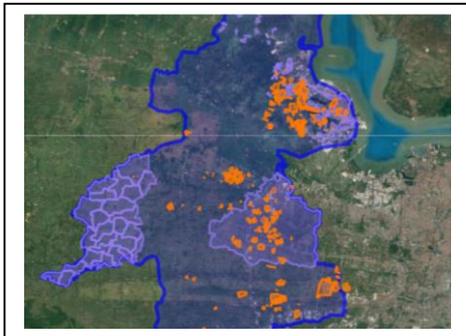
3. Memanfaatkan Teknologi Informasi secara Optimal.

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2009, bahwa pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan pelayanan kepada masyarakat baik berupa jasa, barang maupun pelayanan yang bersifat administrative yang disediakan oleh instansi sebagai penyelenggaraan pelayanan publik. Instansi pemerintahan tersebut juga diharapkan mampu memberikan kemudahan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi informasi oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan publik yaitu *electronic government*.

Electronic government merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. *Electronic government* tersebut dapat mendukung pengelolaan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, sehingga bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat ataupun pihak-pihak lain. Adanya *electronic government* ini juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan ataupun saran mengenai kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah, sehingga hal tersebut dapat memperbaiki kinerja pemerintah untuk kedepannya. Menurut Yunita dan Aprianto (2018) jumlah pemerintah daerah yang mengembangkan *electronic government* yang telah mencapai tahapan pemanfaatan, baru ada sebanyak 4 (empat) pemerintah daerah atau sebesar 0,7% dari 548 pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

Dalam memanfaatkan teknologi informasi berupa *electronic government* ini Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik telah membuat dan mengembangkan inovasi yaitu Rumahku SIP. Inovasi ini hadir dikarenakan beberapa masalah yang timbul, seperti minimnya data perumahan dan kawasan pemukiman, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pengajuan izin mendirikan bangunan yang dapat menyebabkan kurangnya data hunian yang terdapat dalam *database* pemerintah. Selain untuk mengatasi permasalahan diatas, adanya Rumahku SIP ini juga memiliki beberapa tujuan antara lain yaitu untuk pendataan yang valid, sebagai bentuk pemantauan, pengendalian dan juga evaluasi perumahan, keterbukaan informasi antara pemerintah, pengembang perumahan dan masyarakat, serta sebagai wadah pengaduan dan saran oleh masyarakat kepada pemerintah ataupun pengembang perumahan.

Disisi lain, pihak penyelenggara Program Rumahku SIP ini memanfaatkan teknologi UAV Drone dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memotret dan merekam suatu wilayah tertentu dalam radius 200 meter. Menurut Fanida, et al (2021) adanya dukungan infrastruktur seperti perangkat keras dan juga perangkat lunak, akan dapat memudahkan pelaksanaan *electronic government*.



Gambar 2. Geographic Information System (GIS)
(Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik)

Hasil dari pemanfaatan UAV Drone dan Sistem Informasi Geografis (SIG) ini dapat diakses oleh masyarakat luas melalui website Rumahku SIP tersebut. Menurut Sambari Halim Radianto, bahwa dengan menggunakan drone, kualitas citra yang dihasilkan menjadi baik, *realtime*, serta biaya yang digunakan dapat ditekan. Hal ini dikarenakan pengambilan foto udara hanya pada lokasi tertentu yang diperlukan. Selain itu, kelengkapan atribut data dan foto bangunan rumah merupakan hal baru

yang belum dilakukan pada daerah lain”. (sumber: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pendataan-perumahan-akurat-dan-mutakhir-dengan-rumahku-sip>)

4. Meningkatkan Peran serta Dunia Usaha dan Mengembangkan Industri Telekomunikasi dan Teknologi Informasi.

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik harus memanfaatkan perkembangan *electronic government* untuk menumbuhkan dan juga mengembangkan industri dalam negeri yang bergerak dibidang ini. Oleh karena itu, perkembangan industri yang ada juga sangat dipengaruhi oleh tarikan pasar dan juga dorongan yang berasal dari kemajuan teknologi informasi. Dalam mengembangkan inovasi Rumahku SIP ini, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik juga menggandeng beberapa perusahaan pengembang perumahan. Beberapa perusahaan pengembang perumahan tersebut antara lain yaitu PT. Bhumi Kartika Griya Persada, PT. Bambi Sinar Surya Timur Surabaya, PT. Cipta Tunggal Prima, PT. Graha Bunder Utama, PT. Bumi Lingga Pertiwi, dan masih banyak lagi perusahaan pengembang lainnya.

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik bekerja sama dengan beberapa perusahaan pengembang perumahan tersebut bertujuan agar pemerintah dapat lebih melakukan kontrol terhadap perumahan yang ada di Kabupaten Gresik. Adanya Rumahku SIP ini memberi keuntungan untuk perusahaan pengembang perumahan antara lain yaitu akan menurunkan serta mencegah adanya potensi kekumuhan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rizal Sulisty Nugroho, ST, MT selaku Kepala Bidang Rumah Umum yang mengatakan bahwa:

“Inovasi Rumahku SIP ini nantinya akan memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan pengembang perumahan seperti menurunkan dan mencegah poransi kekumuhan karena lahan yang ada tidak disalahgunakan”.

Hal tersebut terjadi dikarenakan Rumahku SIP dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) beserta fungsinya. Adanya Rumahku SIP ini juga dapat menyebabkan perusahaan pengembang perumahan lebih termotivasi untuk berinvestasi di

Kabupaten Gresik berkat data-data valid yang telah tersedia pada aplikasi Rumahku SIP tersebut.

5. Mengembangkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik pada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Otonom, disertai dengan Meningkatkan E-Literacy Masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang penting atau dapat dikatakan SDM adalah faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan dan juga pengembangan *electronic government*. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik dan memiliki kemampuan fisik, intelektual dan juga psikologis sangat mempengaruhi kemajuan suatu pengembangan, terlebih lagi pengembangan pada instansi pemerintahan (Kulla, et al., 2018). Selain itu, peningkatan literasi digital di masyarakat juga dianggap penting. Hal ini bertujuan untuk mendidik masyarakat umum tentang pentingnya memanfaatkan informasi dan teknologi secara efektif (Bachtiar et al., 2020).

Maka dari itu, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik dalam hal ini sudah melakukan beberapa strategi dalam mengembangkan SDM untuk meningkatkan kinerja aplikasi Rumahku SIP ini. Beberapa strategi yang dilakukan tersebut antara lain yaitu dengan melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya pihak tersebut akan melakukan pengambilan foto udara menggunakan drone yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rizal Sulisty Nugroho, ST, MT selaku Kepala Bidang Rumah Umum yang mengatakan bahwa:

“Pembinaan tersebut juga nantinya akan mempermudah survei yang dilakukan saat di lapangan. Pembinaan SDM yang dilaksanakan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan jasa konsultasi bersama pihak ketiga ataupun swakelola dengan melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)”.

Selain pengembangan sumber daya manusia, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik juga melakukan peningkatan *e-literacy* masyarakat untuk mengembangkan Rumahku SIP ini. Dalam peningkatkan *e-literacy* masyarakat pemerintah menyebarkan informasi mengenai aplikasi

Rumahku SIP yang dilakukan dengan cara memanfaatkan beberapa media, selain itu pemerintah juga menyelenggarakan sosialisasi mengenai Rumahku Sip ini di setiap daerah di Kabupaten Gresik. Akan tetapi, meskipun telah dilakukan sosialisasi tetap terdapat beberapa masyarakat yang tidak mengetahui mengenai aplikasi Rumahku SIP ini.



Gambar 3. Sosialisasi dalam Memperkenalkan Inovasi Rumahku SIP

(Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik)

Sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003, dimana pemberdayaan terhadap pemahaman dan kesadaran rentang *e-literacy* perlu dilakukan secara terus-menerus. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan *informan society* atau masyarakat yang memiliki banyak informasi di kalangan masyarakat luas serta daerah sekitar.

6. Melaksanakan Pengembangan secara Sistematis Melalui Tahapan yang Realistik dan Terukur.

Pengembangan *electronic government* perlu direncanakan dan dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak. Dalam pengembangan *electronic government* tersebut dapat dilaksanakan melalui empat tingkatan antara lain yaitu persiapan, pematangan, pemantapan, dan juga pemanfaatan.

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik sudah cukup baik dengan melakukan tahapan yang runtut. Tahap pertama yaitu tahap persiapan, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten

Gresik melakukan tahap persiapan yang meliputi persiapan pengembangan aplikasi dan juga persiapan pemutakhiran data. Persiapan pengembangan aplikasi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dimungkinkan untuk ditambahkan sebagai fitur baru atau pengembangan maupun perbaikan fitur yang ada. Sedangkan persiapan pemutakhiran data dilakukan dengan cara mengidentifikasi perumahan atau kawasan pemukiman mana yang akan ditambahkan atau diperbarui datanya. Kedua tahap ini dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang menjadi pedoman dan ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga.

Tahap yang kedua yaitu tahap pematangan. Tahap pematangan ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi, sosialisasi dan juga pelatihan mengenai penggunaan aplikasi Rumahku SIP. Koordinasi, sosialisasi dan juga pelatihan tersebut dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang bersangkutan. Maka dari itu, setiap organisasi perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi Rumahku SIP ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rizal Sulisty Nugroho, ST, MT selaku Kepala Bidang Rumah Umum yang mengatakan bahwa:

“Pada Tahap ini setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memanfaatkan aplikasi yang diberikan dengan menggunakan *username* dan *privilege* sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Tahap yang ketiga yaitu tahap pematapan. Tahap pematapan ini dilakukan dengan melibatkan pengembang perumahan untuk secara mandiri melakukan pengiriman dan juga pembaruan data perusahaan maupun data keterbanguan perumahan yang telah dibangun oleh pihak pengembang yang bersangkutan.

Tahap keempat sekaligus tahap yang terakhir yaitu tahap pemanfaatan. Dalam pemanfaatan aplikasi Rumahku SIP ini dibedakan antara organisasi perangkat daerah, pengembang, dan juga pemerintah desa serta masyarakat. *Privilege* antara keempat pengguna tersebut juga dibedakan berdasarkan lokasi dan pengaturan fitur yang disediakan. Bagi masyarakat yang akan mengakses Rumahku SIP secara lebih detail dapat mengajukan *username* dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh

pihak yang bersangkutan dengan pemberian hak akses tertentu pada lokasi yang tertentu pula.

Berdasarkan tahapan-tahapan pengembangan Rumahku SIP yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gresik ini, dapat dilihat bahwa pada setiap tahapan telah dilakukan secara terukur, realistic serta terstruktur dengan baik sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Analisis Strategi Pengembangan Rumah Khusus dan Umum dalam Sistem Informasi Pendataan dan Pemantauan (RUMAHKU SIP) pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur” dapat disimpulkan bahwa: Inovasi Rumahku SIP merupakan salah satu terobosan yang dibuat oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik dalam menghadapi permasalahan terkait kurangnya data hunian dalam *database* pemerintah. Data tersebut merupakan sumber acuan yang nantinya digunakan dalam proses pengajuan dalam kebijakan tata ruang. Dalam pelaksanaannya, Rumahku SIP perlu dilakukan strategi pengembangan. Hal ini dilakukan agar inovasi ini dapat bekerja lebih baik lagi dalam mengatasi masalah yang terjadi. Strategi pengembangan inovasi Rumahku SIP oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik dikaji menggunakan strategi pengembangan *electronic government* sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 yang terdapat strategi pengembangan.

Strategi yang pertama yaitu, memberikan sekaligus mengembangkan sistem pelayanan prima (andal, terpercaya, dan transparan) yang dapat dijangkau oleh semua kalangan yang dapat diwujudkan dalam penggunaan inovasi Rumahku SIP. Sejak pelaksanaan Rumahku SIP tersebut, masalah-masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan.

Strategi yang kedua, dalam pengembangan Rumahku SIP ini yaitu adanya kerjasama antara Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik dengan beberapa organisasi perangkat daerah yang diberi nama Satuan Kerja Pelaksana Pengawasan Pengendalian Perumahan Dan Kawasan Pemukiman yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang (DPUTR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP).

Strategi ketiga yaitu, Rumahku SIP ini juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bentuk *electronic government* yang diwujudkan dalam penggunaan UAV Drone dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memotret dan merekam suatu wilayah tertentu dalam radius 200 meter.

Strategi yang keempat yaitu, adanya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik dalam pengembangan Rumahku SIP. Kerjasama tersebut dilakukan dengan beberapa perusahaan pengembang perumahan seperti PT. Bhumi Karika Griya Persada, PT. Bambe Sinar Surya Timur Surabaya, PT. Cipta Tunggal Prima, PT. Graha Bunder Utama, PT. Bumi Lingga Pertama dan perusahaan pengembang perumahan lainnya dalam rangka mengembangkan inovasi Rumahku SIP.

Strategi kelima yaitu, adanya pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diselenggarakan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam pihak yang akan melakukan pengambilan foto udara menggunakan UAV Drone. Pembinaan SDM yang dilaksanakan tersebut melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Strategi keenam yaitu, melaksanakan pengembangan *electronic government* secara realistis dan terukur, melalui empat tingkatan diantaranya yang pertama, yaitu tahap persiapan yang meliputi persiapan pengembangan aplikasi dan pemutakhiran data. Kedua, yaitu tahap pematangan dalam wujud koordinasi, sosialisasi, dan juga pelatihan dalam penggunaan aplikasi Rumahku SIP. Ketiga, yaitu tahap pemantapan yang melibatkan perusahaan pengembang perusahaan dalam pembaharuan data. Dan yang keempat, yaitu tahap pemanfaatan aplikasi Rumahku SIP.

Penerapan keenam strategi pengembangan menurut Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik tersebut diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi terkait data hunian di Kabupaten Gresik sekaligus meningkatkan kesadaran khususnya masyarakat Gresik terkait pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat diketahui bahwa strategi pengembangan Rumahku SIP yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik telah berjalan secara

optimal. Tetapi dalam beberapa hal, harus dilakukan perbaikan kembali. Oleh karena itu diperlukan rekomendasi atau masukan yang konstruktif dalam pelaksanaan strategi pengembangan yang kurang. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa saran atau masukan yang diberikan peneliti antara lain yaitu:

1. Diperlukan adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai Rumahku SIP dan juga penggunaan aplikasi Rumahku SIP tersebut. Sehingga masyarakat lebih memahami bagaimana aplikasi Rumahku SIP tersebut.
2. Sebagai salah satu cara lain dalam memaksimalkan inovasi Rumahku SIP ini, perlu adanya pemberitahuan mengenai alur mekanisme penggunaan aplikasi Rumahku SIP dalam bentuk banner, poster atau hal sejenisnya yang disebarluaskan melalui offline maupun media online seperti website ataupun media sosial yang dimiliki oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan agar aplikasi ini dapat semakin cepat dikenal dan diketahui oleh masyarakat.
3. Perlu adanya alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) khusus terutama pegawai yang mempunyai latar belakang teknologi informasi untuk *menghandle* dan mengatasi masalah yang terjadi ketika proses pelaksanaan penggunaan aplikasi Rumahku SIP, sehingga masalah tersebut dapat diatasi dengan baik dan dalam waktu yang singkat.

Ucapan Terimakasih:

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini, diantaranya yaitu:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Dra. Meirinawati, M.AP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan dalam penyusunan artikel ini.
3. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP selaku dosen penguji yang sudah menilai dan memberi masukan dalam penyusunan artikel ini.
4. Trena Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP selaku dosen penguji yang sudah menilai dan memberi masukan dalam penyusunan artikel ini.
5. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik yang telah memberikan data terkait penelitian ini.

6. Dan pihak lain yang memberi dukungan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini.

Kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan pembangunan desa tinggilbet distrik beoga kabupaten Puncak provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Niswah, Fitrotun dan Meirinawati. 2015. *Manajemen Strategi Sektor Publik*. Surabaya: Unesa University Press.

Rivai dan Darsono, *Manajemen Strategis*. Jakarta, 2005.

Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

David, Fred R, 2011. *Strategic Management*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat

Jurnal :

Arief, V., Elida, S. S., & Wahyuni, E. (2020). Collaboration Development of Electronic Government Innovations in Pontianak City.

Artitiantia, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2).

Bachtiar, R., Pramesti, D. L. D., Pratiwi, H. E., & Saniyyah, N. (2020). Birokrasi Digital: Studi Tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 104-129.

Fanida, E. H., Rahaju, T., Niswah, F., Megawati, S., & Devi, A. (2021, December). Implementation of Electronic Government Through the People's Service System in Sidoarjo (SIPRAJA) in Tambakrejo Village, Waru District, Sidoarjo Regency. In *International Joined Conference on Social Science (ICSS 2021)* (pp. 82-90). Atlantis Press.

Silva, B. N., Khan, M., & Han, K. (2018). Towards sustainable smart cities: A review of trends, architectures, components, and open challenges in smart cities. *Sustainable Cities and Society*, 38, 697-713.

Kulla, T., Rumapea, P., & Tamongangoy, D. (2018).

Prasetya, A. Y., & Niswah, F. (2020). Strategi Peningkatan Pelayanan Pembayaran Surat Izin Mengemudi Melalui Program Cashless Payment System (CPS) di Kantor Satlantas Polres Gresik. *Publika*, 8(4).

Ramadhani, D. A. (2018). Efektivitas Pelayanan Satu Pintu (*One Stop Service*) Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Wahyud, S. (2019). Teori Inovasi: Sebuah Tinjauan Pustaka Septian. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).

Wanto, A. H. (2019, August). Government Strategy to Support Performance of E-Government (A case study in Malang, Tuban, and Bondowoso). In *Annual International Conference of Business and Public Administration (AICoBPA 2018)* (pp. 17-19). Atlantis Press.

Widiyaningrum, W. Y. (2020). Kajian Teoritis: Strategi Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pakuhan*, 01.

Widodo, N. (2019). Innovation Patterns of Local Government in Handling Community Complaints Based on Information Systems. In *Annual International Conference of Business and Public Administration (AICoBPA)* (Vol. 93, pp. 158-164).

Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia: Analisis Website. In *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi* (pp. 329-336).

Yustiari, S. H. (2019, August). E-Government Innovation: E-Wadul application for better public service of Surabaya City. In *Annual International Conference of Business and Public Administration (AICoBPA 2018)* (pp. 209-211). Atlantis Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Website:

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pendataan-perumahan-akurat-dan-mutakhir-dengan-rumahku-sip> diakses pada 24 November 2021.

<http://perkim.gresikkab.go.id/main/detail/32> diakses pada 24 November 2021.

<https://klikjatim.com/inovasi-rumahku-sip-antarkan-bupati-gresik-raih-penghargaan-top-45-inovasi-pelayanan-publik-tahun-2020/> diakses pada 24 November 2021.

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pendataan-perumahan-akurat-dan-mutakhir-dengan-rumahku-sip> diakses pada 26 Mei 2022

